PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2020

Hal.: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Polda Tunggu Telaah BPKP

Dugaan Korupsi Proyek Jalan Dermaga Kamboja Baru KKU

PONTIANAK - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat masih mendalami indikasi korupsi dalam proyek peningkatan ruas jalan Dermaga Kamboja Baru, Kecamatan Pulau Maya, Kayong Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp 5,7 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kayong Utara tahun 2018.

Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar sudah melakukan ekspose ke Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui jumlah kerugian keuangan negara.

"Tanggal 7 Februari lalu, penyidik sudah melakukan ekspos ke BPKP, kita masih menunggu hasil telaah dari BPKP. Semua ini masih dalam rangkaian

◆Ke Halaman 7 kolom 1

Polda Tunggu Telaah BPKP

Sambungan dari halaman 1

penyelidikan," kata Donny kepada *Pontianak Post*, kemarin.

Kendati demikian, pihaknya masih enggan menyampaikan informasi secara rinci terkait perkara yang sedang ditangani itu.

Berdasarkan data LPSE Kabupaten Kayong Utara dengan kode tender 1168393, Proyek Peningkatan ruas jalan Dermaga Kamboja Baru, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara (KKU) tersebut dilaksanakan oleh PT. Gemilang Nusa Prakasa berdasarkan lelang tertanggal 31 Mei 2018.

Sebelumnya Kepala Bidang Bina Marga Dians Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kayong Utara Rahadi mengatakan, pembangunan ruas Jalan Kamboja baru merupakan salah satu prioritas Kabupaten Kayong Utara untuk menghubungkan kecamatan Pulau Maya ke Ibu Kota Kabupaten Kayong Utara melalui Kecamatan Teluk Batang.

Saat ini, kata Rahadi, pengerjaan jalan tersebut baru sampai tahap pondasi bawah dan masih ada beberapa tahapan lagi terhadap konstruksi sampai dengan finishing (lapisan aspal).

"Ini baru tahap awal. Karena masih ada beberapa tahapan lagi sampai finishing atau lapisan aspal," katanya saat dihubungi *Pontianak Post* waktu itu.

Dikatakan Rahadi, perkem-

PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

20 20

Hal.: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

bangan ruas jalan tersebut tetap akan dilanjutkan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Sementara terkait indikasi masalah terhadap pengerjaan proyek itu, menurut Rahadi, harus dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang bisa dipertanggung jawabkan secara teknis.

"Untuk mengetahuinya saya menyarankan agar menanyakan langsung kepada PPK. Karena yang bersangkutan yang memegang dokumen laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga audit resmi pemerintah ada dengan PPK," pungkasnya.

Kasus Bansus Bengkayang

Sementara itu selain menangani perkara dugaan korupsi peningkatan ruas jalan Dermaga Kamboja Baru, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Polda Kalbar juga sedang menangani kasus dugaan korupsi dana Bantuan Khusus (Bansus) Kabupaten Bengkayang tahun 2017, yang menyeret dua pejabat di Badan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang.

Dalam kasus itu, Indikasi penyelewengan dana bermula saat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang, menyalurkan uang Rp20 miliar dengan nilai bervariasi ke rekening 48 desa pada 29 Desember 2017.

Penyaluran dana tersebut dilakukan tanpa adanya proposal pengajuan dari pemerintah desa. Atas petunjuk pihak BPKAD kepada pemerintah desa, dana yang disalurkan itu untuk membayar pekerjaan fisik kepada pihak ketiga yang telah ditentukan oleh BPKAD, tanpa termuat sebelumnya di dalam APBDesa atau APBDesa Perubahan.

Pekerjaan itu juga tidak dilengkapi dengan domumen progres pekerjaan serta dokumen pembayaran, dan berakibat pada pembayaran yang tidak sesuai dengan program kerja anggaran. Setelah pengiriman dana itu, pihak desa baru diminta membuat proposal pengajuan dengan dibantu konsultan yang telah disiapkan oleh BPKAD.

"Pekerjaan fisik itu tidak hanya yang dikerjakan tahun 2017, tetapi ada juga tahun 2016. Inikan pelanggaran," kata Donny dalam keterangan pers, Juli 2019.

Dari rangkaian penyelidikan, dari 48 rekening desa yang menerima dana tersebut, 23 di antaranya belum melakukan pencarian. Menurut Donny, uang di 21 dari 23 rekening desa tersebut telah disita pihak kepolisian. Jumlahnya mencapai Rp6,6 miliar. Sementara, 2 desa sisanya masih dalam proses.

"Untuk 25 desa yang telah mencairkan itu masih dalam penyelidikan kami, untuk mengetahui dan melacak ke mana saja alirannya," katanya.

Dikatakan Donny, dalam penanganan kasus ini, Polda Kalbar telah melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara sepanjang tahun 2019 menangani 26 kasus. Mengalami penurunan 2 kasus atau turun 7,14% dibanding tahun 2018 dengan jumlah kasus sebanyak 28 kasus. ***(arf)***